



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI UNTARI
2. Jabatan : KETUA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SAIN
VETERINER (PAW)
3. NHK : 971111

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.280.000.000

1. Tanah Seluas 2.812 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI ,
LAINNYA , Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 668 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, LAINNYA Rp.
250.000.000
3. Tanah Seluas 82 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m2/200 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.470.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 73.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 479.526.266

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.836.776.266

III. HUTANG Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

3.836.776.266

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.